

Artikel Riset

18 Februari 2021

Saatnya menormalkan penghormatan dan pemulihan Hak Asasi Manusia di sektor pertambangan

Hak Asasi Manusia menjangkau berbagai macam isu, dan aktivitas pertambangan pada dasarnya dapat memengaruhi sebagian besar isu tersebut. Sudah 10 tahun sejak diadopsinya Prinsip-Prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), data dari [RMI Report 2020](#) menunjukkan bahwa skor penilaian rata-rata perusahaan pertambangan besar terkait isu hak asasi manusia hanya mencapai 19%. Kini sudah tiba saatnya bagi perusahaan pertambangan untuk sepenuhnya menerapkan prinsip ‘penghormatan’ dan ‘pemulihan’ pada semua aspek Hak Asasi Manusia.

Penerapan UNGPs

Prinsip-Prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) adalah standar global yang otoritatif mengenai bisnis dan hak asasi manusia. Semua perusahaan – bukan hanya perusahaan pertambangan – berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan melakukan pemulihan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, hak asasi manusia merupakan inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB yang didukung secara universal – menurut Institut Denmark untuk Hak Asasi Manusia (Danish Institute for Human Rights), 90% dari target TPB terkait langsung dengan hak asasi manusia.¹

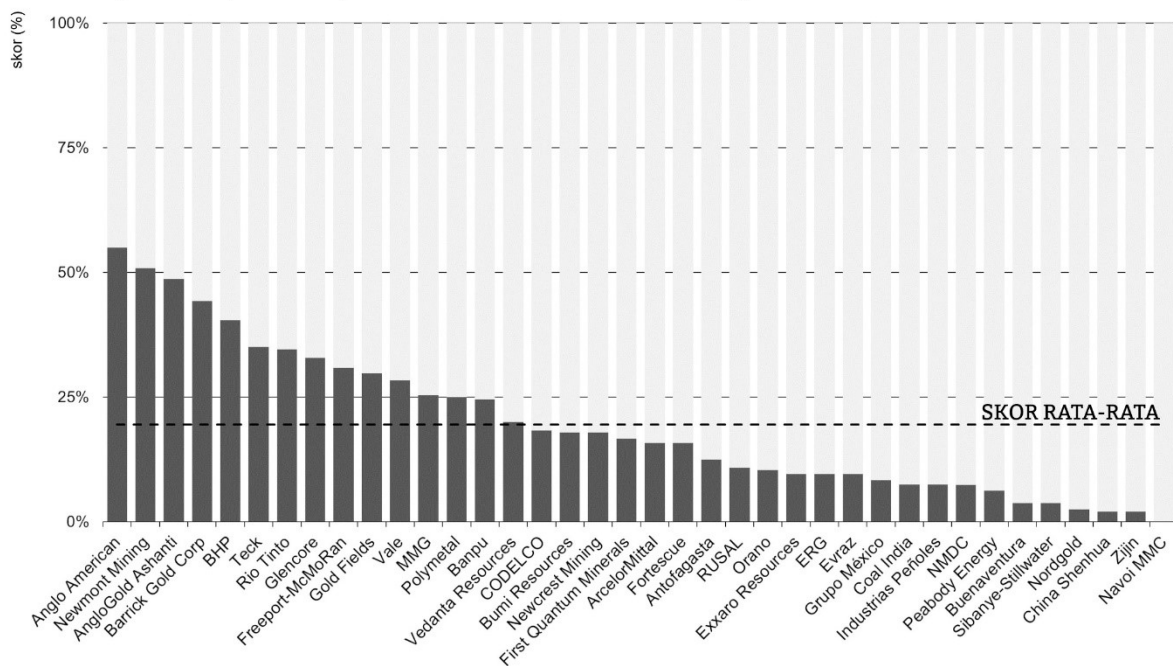
Lalu apakah status terkini mengenai hak asasi manusia di sektor pertambangan?

Bukti menunjukkan bahwa kini semakin banyak perusahaan yang mengintegrasikan isu hak asasi manusia di dalam pelaporan publiknya. Dengan kerapnya hak asasi manusia diidentifikasi sebagai masalah ‘penting’ bagi perusahaan pertambangan, pembuat kebijakan,

pemegang saham dan pemodal, ini menjadi hal yang membesarkan hati. Namun, sebagian besar perusahaan yang dinilai di dalam [RMI Report 2020](#) tidak ada yang menunjukkan bukti penerapan komitmen perusahaan mereka ke dalam rencana tindakan, proses uji tuntas yang menyeluruh, dan mengukur efektivitas penerapannya.²

Rata-rata kelompok perusahaan pertambangan besar yang dinilai di dalam RMI Report 2020 mendapat skor rendah sebesar 19% untuk isu terkait hak asasi manusia (Lihat Gambar 1 di bawah).

Gambar 1 Skor rata-rata perusahaan terkait hak asasi manusia
(Hasil dari laporan RMI Report 2020 – 59 metrik terkait hak asasi manusia)



Mengomentari hasil tersebut, Phil Bloomer, Direktur Eksekutif Pusat Bisnis dan Sumber Daya Manusia, mengatakan bahwa:

“Laporan ini menyoroti kinerja yang lebih baik dari sekelompok kecil perusahaan terkemuka serta memaparkan kelalaian sebagian besar perusahaan. Hal ini tidak hanya menyebabkan para pekerja dan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran, tetapi juga meningkatkan risiko yang dihadapi perusahaan dan investor, terutama saat keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mencegah pelanggaran semakin besar.”

Menunjukkan sejumlah kemajuan tetapi masih kurang dalam hal pendekatan yang komprehensif

- Komitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia
- Pembela Hak Asasi Manusia
- Uji Tuntas HAM (HRDD) untuk seluruh pertambangan
- Uji Tuntas HAM (HRDD) untuk seluruh Pemasok dan Kontraktor
- Uji Tuntas HAM (HRDD) terkait Merger, Akuisisi dan Pelepasan
- Pekerja Paksa dan Pekerja Anak
- Keamanan dan Hak Asasi Manusia
- Wilayah yang terdampak konflik dan berisiko tinggi
- Masyarakat Adat
- Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)
- Hak Atas Air
- Hak atas tanah
- Permukiman Kembali
- Pengaduan Masyarakat
- Upah Hidup
- Hak Dasar Pekerja
- Pengaduan Pekerja

Topik terkait hak asasi manusia yang tercakup dalam RMI Report 2020

Menurut data RMI Report 2020, terdapat sejumlah perusahaan yang mendapat skor 75% atau lebih untuk strategi manajemen dan rencana tindakan mereka dalam mengukur dan menangani risiko-risiko spesifik terkait isu-isu seperti hak atas air, hak Masyarakat Adat, hak atas tanah, permukiman kembali, hak pekerja, tenaga keamanan atau pekerja anak.

Namun hal yang memprihatikan adalah minimnya konsistensi perusahaan pertambangan ini pada semua isu hak asasi manusia. Jika 59 metrik terkait hak asasi manusia diambil rata-ratanya, skor tertinggi yang dicapai hanyalah 55%, di mana hanya dua perusahaan (Anglo American dan Newmont) yang mencapai skor lebih dari 50%.

Selain itu, hampir tidak ada bukti tindakan perusahaan dalam mengatasi sejumlah isu hak asasi yang penting, seperti memastikan upah hidup bagi pekerja pertambangan, mengukur efektivitas mekanisme pengaduan atau menilai risiko yang ditimbulkan pertambangan terhadap masyarakat di wilayah yang berisiko tinggi dan terdampak konflik.

Laporan ini lebih lanjut menekankan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif terhadap semua aspek hak asasi manusia dalam praktik perusahaan.

Mengomentari kurangnya konsistensi ini, Dante Pesce, Ketua Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa:

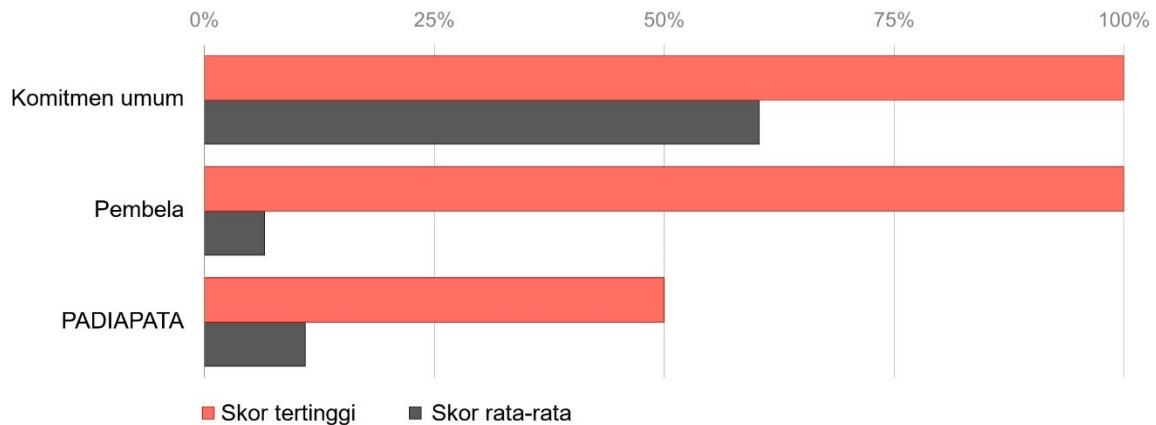
“Kepemimpinan artinya bertindak dengan integritas dan mewujudkan prinsip-prinsip menjadi tindakan nyata di mana pun Anda beroperasi. Hasil perbandingan ini menegaskan bahwa sangat penting bagi perusahaan pertambangan untuk meningkatkan dan meneladani praktik kerja unggulan di seluruh aspek hak asasi manusia, di semua lokasi pertambangannya. Seruan dekade implementasi global UNGPs memberikan peluang unik untuk menormalkan dan mengedepankan penghormatan dan pemulihan Hak Asasi Manusia di sektor ini.”

Penyederhanaan yang berlebihan menimbulkan kecurigaan tentang pemolesan laporan

Hak asasi manusia mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Namun penelitian RMF menunjukkan bahwa banyak perusahaan pertambangan yang memperkecil ruang lingkup hak asasi manusia menjadi serangkaian isu yang sangat terbatas, sehingga dengan demikian melindungi mereka dari dampak dan tanggung jawab nyata yang timbul seandainya mereka memberikan pengakuan penuh atas hak asasi manusia. Dengan melakukan hal tersebut, mereka kehilangan kesempatan untuk memainkan perannya dalam mengedepankan penormalan hak asasi manusia dan untuk sepenuhnya mengatasi dampaknya terhadap, dan menangani keprihatinan dari, semua pemangku kepentingan.

Sejumlah perusahaan berpendapat bahwa kebijakan khusus tidaklah diperlukan, misalnya tentang pembela hak asasi manusia atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIAPATA), apabila ada komitmen hak asasi manusia yang menyeluruh (Lihat Gambar 2). Namun mengingat maraknya ancaman dan pembunuhan yang dihadapi para pembela hak asasi manusia, hak atas tanah dan lingkungan, jelaslah bahwa perusahaan harus lebih lugas terkait dengan ruang lingkup hak asasi manusia yang harus mereka hormati dan pulihkan. Penyederhanaan berlebihan terhadap komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan terkait pemolesan laporan.

Gambar 2 Perbandingan komitmen umum dan komitmen hak asasi manusia atas masalah spesifik
(Hasil dari laporan RMI Report 2020 – D.01.1, D.01.4, dan D.09.1)



Menerapkan dasar-dasar pemulihan

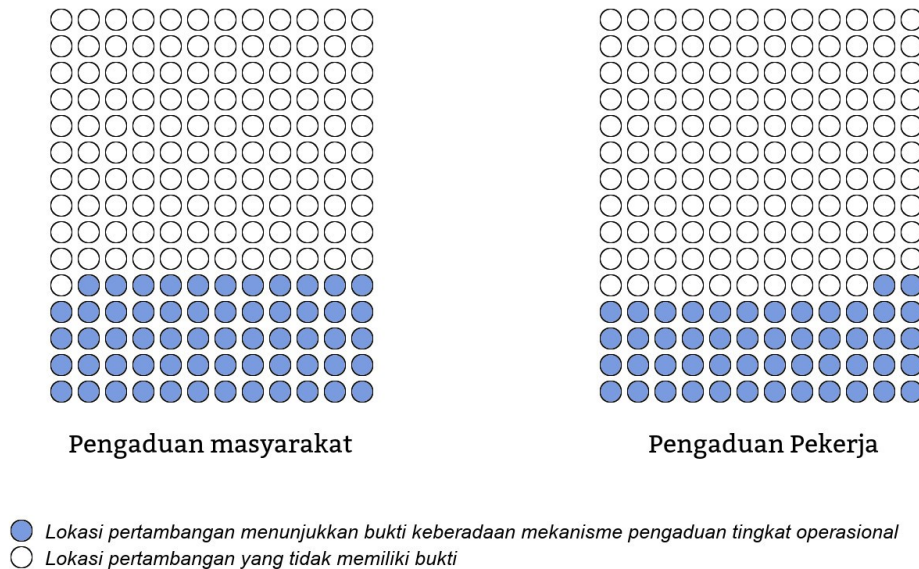
Akses ke pemulihan adalah salah satu dari tiga pilar UNGPs, sebagai pengakuan atas “kebutuhan untuk menyesuaikan hak dan kewajiban dengan pemulihan yang tepat dan efektif seandainya terjadi pelanggaran”.³ Mekanisme pengaduan tingkat operasional merupakan titik awal yang penting untuk menyediakan pemulihan bagi masyarakat dan pekerja yang terdampak.

Ketika beroperasi dengan efektif, mekanisme semacam ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah kecil sebelum berkembang menjadi konflik yang tidak terkendali; membantu menghindari protes atau penolakan terhadap proyek pertambangan dan perselisihan hukum yang berbiaya mahal; serta meningkatkan akses ke pembiayaan proyek. Informasi yang dihasilkan melalui mekanisme pengaduan tingkat operasional juga dapat mempermudah pembelajaran yang dapat mendukung pengelolaan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan pekerja dalam jangka panjang.

Hasil mekanisme pengaduan di dalam RMI Report 2020 tampak kurang menggembirakan. Di tingkat lokasi pertambangan, di mana 180 lokasi pertambangan di 49 negara produsen dinilai berdasarkan indikator paling dasar, terdapat hanya sekitar sepertiga dari lokasi pertambangan yang mengungkapkan informasi tentang mekanisme pengaduan tingkat operasional bagi masyarakat dan pekerja (Lihat Gbr 3.).

Gambar 3 **Bukti mekanisme pengaduan tingkat operasional di 180 lokasi pertambangan**

Hasil dari laporan RMI Report 2020 – MS.04 dan MS.05)



Kurangnya bukti ini menimbulkan keraguan mengenai kemampuan perusahaan untuk mengetahui dan menanggapi pengaduan.

Di tingkat perusahaan, hasilnya juga sama rendahnya. Kurang dari separuh perusahaan yang menunjukkan bukti pengukuran fungsi dan penerapan mekanisme pengaduan masyarakat mereka, dan tidak ada perusahaan yang memberikan rincian tentang tindakan yang diambil atau pemulihan yang diterapkan untuk menanggapi pengaduan yang diajukan. Pola yang serupa juga terlihat pada pengaduan pekerja.

Sejumlah perusahaan menunjukkan bahwa mereka telah melakukan peninjauan atau audit terkini mengenai efektivitas mekanisme pengaduan masyarakatnya, tetapi hampir tidak ada bukti bahwa perusahaan menindaklanjuti hasil peninjauan atau audit ini untuk meningkatkan efektivitas mekanisme tersebut. Dalam hal ini, pekerja tampak semakin terabaikan, karena tidak ada perusahaan yang menunjukkan bukti telah melakukan peninjauan atau audit terkini terkait mekanisme pengaduan pekerja mereka.

Kurangnya perhatian umum terhadap mekanisme pengaduan dan efektivitasnya ini menunjukkan tidak adanya komitmen yang serius terhadap prinsip UNGP untuk “penghormatan” atau “pemulihan”.

Investor membantu untuk menetapkan norma

Para pemimpin dari komunitas investasi menyadari bahwa kinerja di bidang lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) yang kuat dan rekam jejak yang solid tentang hak asasi manusia akan berkontribusi terhadap lingkungan bisnis yang stabil dan tingkat risiko yang lebih rendah. Menurut Investor Alliance on Human Rights, “investor semakin sadar dan prihatin mengenai besarnya risiko operasional, keuangan, hukum dan reputasi yang mungkin dihadapi perusahaan jika mereka gagal mengelola risiko hak asasi manusia”.⁴ Jadi, saat perusahaan menghadapi keprihatinan, konflik dan bahkan gangguan yang semakin meningkat di lapangan, para investor, pemimpin, pemberi pinjaman serta pemodal juga menghadapi risiko hak asasi manusia yang semakin meningkat.

Investor dapat membantu mendorong standar dan kinerja yang lebih tinggi terkait hak asasi manusia di semua portofolio pertambangan mereka dalam berbagai cara. Investor dapat melibatkan perusahaan, komunitas keuangan, dan inisiatif banyak pemangku kepentingan untuk mengedepankan pembelajaran dan pengembangan kapasitas. Pemberi pinjaman dapat memberikan insentif pada persyaratan pinjaman berdasarkan target kinerja LST yang disepakati, dan pemangku kepentingan dapat langsung mengajukan dan memberikan suara guna mendukung proposal yang secara jelas mengintegrasikan hak asasi manusia dalam strategi bisnisnya. Bersama-sama dengan pembuat kebijakan, para investor, dan bank jelas berada dalam posisi yang kuat untuk mempercepat transisi ke penormalan hak asasi manusia yang penting.⁵

Pembuat kebijakan memberdayakan tindakan yang lebih luas dalam rantai nilai

Contoh perundang-undangan terbaru dengan persyaratan uji tuntas yang mengikat bagi perusahaan (seperti Undang-Undang Kewajiban Perusahaan Prancis 2017⁶ dan Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris 2015⁷) telah menunjukkan potensi bagi perusahaan multinasional untuk meningkatkan standar hak asasi umum di antara mitra bisnis, pemasok, dan kontraktor mereka. Dengan diadopsinya Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Jepang tahun 2015⁸, Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang baru-baru ini mewajibkan agar pengungkapan modal manusia disertakan dalam pengajuan ke regulator⁹, Panduan Pelaporan Non-Keuangan UE (NFRD) yang saat ini sedang ditinjau, dan meningkatnya kekhawatiran mengenai keberlanjutan dalam sektor swasta Tiongkok¹⁰, para regulator utama kini memberikan penekanan tentang pentingnya hak asasi manusia.

Selaras dengan perkembangan momentum dari konsumen hilir yang menginginkan pemasokan bahan baku yang lebih bertanggung jawab dan etis, sekarang adalah momentum yang baik untuk mewujudkan hak asasi manusia di seluruh rantai nilai.

Namun, perusahaan pertambangan menunjukkan hasil yang beragam terkait pengadaan dan pembuatan kontrak yang bertanggung jawab dalam RMI Report 2020. Meskipun sebagian besar perusahaan menyebutkan adanya pendekatan pengadaan yang bertanggung jawab, hanya sedikit perusahaan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem resmi untuk menilai masalah hak asasi manusia yang terkait dengan pemasok dan kontraktor mereka. Untuk perusahaan yang telah menetapkan persyaratan hak asasi manusia untuk calon pemasok dan kontraktor serta pemasok dan kontraktornya yang ada saat ini, hanya sedikit bukti yang diberikan perusahaan terkait uji tuntas pro-aktif pada semua mitra bisnis berdasarkan persyaratan ini.

Mengingat momentum regulasi, perusahaan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan melalui penerapan proaktif di seluruh operasinya, terlepas dari yurisdiksinya, alih-alih menunggu dipaksa dulu untuk bertindak oleh ketentuan hukum.

Menghormati Hak Asasi Manusia di segala aspek kepemilikan dan waktu

Hal yang sering terabaikan dan lebih sulit diukur adalah masalah uji tuntas hak asasi manusia terkait Merger, Akuisisi dan Pelepasan – hal ini sering kali luput dari perhatian investor dan pembuat kebijakan. Hanya sedikit perusahaan di dalam RMI Report 2020 yang menunjukkan bukti kepemilikan sistem untuk memastikan bahwa uji tuntas atas merger akuisisi dan pelepasan mencakup masalah hak asasi manusia yang krusial.

Merger dan akuisisi berpotensi menempatkan perusahaan di dalam pasar di mana hak asasi manusia dalam posisi yang terancam oleh rezim dan penegakan hukum yang lemah atau oleh hubungan yang buruk antara industri pertambangan dan masyarakat. Situasi ini dapat ditafsirkan sebagai biaya yang tinggi bagi perusahaan dalam hal tindakan hukum, penundaan operasional, waktu yang dihabiskan karyawan untuk mengatasi masalah tak terduga, rusaknya reputasi karena konflik dengan masyarakat dan hilangnya kepercayaan dari investor.

Selaras dengan itu, pelepasan aset pertambangan tidak hanya menciptakan potensi kewajiban jangka panjang bagi pembeli, tetapi juga bagi penjual, pemerintah dan

masyarakat jika pembeli tidak memiliki keterampilan teknis atau keuangan yang memadai untuk mengelola dan memulihkan risiko hak asasi manusia secara memadai selama masa operasional dan pasca penutupan suatu lokasi pertambangan. Ditambah dengan kurangnya bukti bahwa pengaturan keuangan sosial-ekonomi dan perjanjian penutupan benar-benar diterapkan saat menjual lokasi pertambangan kepada perusahaan baru, perusahaan lebih kecil dan/atau bersumber daya rendah¹¹, semua hasil ini seharusnya mendorong munculnya perhatian yang lebih besar dari perusahaan, investor dan regulator.

Kesimpulan

Meskipun RMI Report 2020 mendorong peningkatan dalam pertambangan yang bertanggung jawab dengan penekanan pada praktik utama dan kontribusi positif yang dapat ditemukan, dampak negatif yang berat akibat aktivitas pertambangan perusahaan juga harus diakui.

17% dari semua kasus yang ditangani oleh National Contact Points for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (NCP) sejak tahun 2000 atas dugaan pelanggaran adalah terkait dengan pertambangan dan penggalian (86 dari 496 untuk semua industri). Pertambangan masih menjadi sektor paling mematikan secara global bagi pembela hak asasi manusia dan hak atas tanah.¹² Skala dan berlarut-larutnya dampak negatif yang berat sangat menghambat kemajuan yang dibuat perusahaan dalam mewujudkan pengelolaan yang lebih efektif atas isu-isu hak asasi manusia dan LST.

Berkat momentum yang tercipta oleh seruan Dekade Implementasi Global UNGPs, penormalan penghormatan dan pemulihan atas hak asasi manusia di dalam industri pertambangan juga akan memperkuat tujuan Dekade Tindakan PBB untuk mewujudkan TPB.

¹ The Danish Institute for Human Rights, "The Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals". <https://sdg.humanrights.dk/>

² RMF (2020), "RMI Report 2020". <https://2020.responsibleminingindex.org/>

³ United Nations (2011), "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework". https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

⁴ Investor Alliance for Human Rights (ICCR) (2020), "Investor Toolkit on Human Rights". <https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2020-05/Full%20Report-%20Investor%20Toolkit%20on%20Human%20Rights%20May%202020c.pdf>

⁵ "This has been a crucial driver for the integration of human rights within enterprises and has secured a place for human-rights considerations at the top of the business agenda." in IOE (International Organisation of Employers) (2021), "#UNGPsPlus10: Achievements, challenges, and the way forward in the uptake and implementation of the UNGPs". <https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=148306&token=a389abc4b2b87d173023a7140bb103087b4b609b>

⁶ Légifrance (2017), "LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre". <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/>

⁷ Legislation.gov.uk (2015), "Modern Slavery Act 2015" <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>

⁸ JPX (2015), "Japan's Corporate Governance Code (Provisional translation)". <https://www.jpx.co.jp/english/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/b7gje60000029qfh.pdf>

⁹ SEC (2020), "SEC Adopts Rule Amendments to Modernize Disclosures of Business, Legal Proceedings, and Risk Factors Under Regulation S-K". <https://www.sec.gov/news/press-release/2020-192>

¹⁰ China Briefing (2020), "Sustainability Reporting in China: The Rise of CSR and ESG Reporting by Businesses" <https://www.china-briefing.com/news/sustainability-reporting-china-csr-esg-reporting-business-accountability/>

¹¹ RMF (2020), "It takes money to leave positive mining legacies: Where is it?" https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMFxTheLawyersDaily_FinancingPostClosure_December2020.pdf

¹² Global Witness (2020), "Defending Tomorrow". https://www.globalwitness.org/documents/19939/Defending_Tomorrow_EN_low_res_-_July_2020.pdf

Responsible Mining Foundation

Responsible Mining Foundation (RMF) ini sebuah lembaga penelitian independen yang mendorong perbaikan terus-menerus di bidang ekstraktif yang bertanggung jawab di seluruh industri tambang melalui pengembangan alat dan kerangka kerja, penyebaran data yang menjadi kepentingan publik, dan dorongan keterlibatan yang penuh kesadaran dan konstruktif antara perusahaan tambang dengan para pemangku kepentingan yang lain.

Sebagai sebuah lembaga yang independen, RMF tidak menerima pendanaan atau sumbangan lain dari industri ekstraktif. www.responsibleminingfoundation.org

Penafian

Temuan, simpulan, dan penafsiran dalam artikel atau laporan RMI Report 2020 ini tidak serta-merta mewakili pandangan penyandang dana, wali amanat, dan karyawan Responsible Mining Foundation (RMF), serta pihak-pihak lain yang berpartisipasi dalam proses konsultasi dan yang bertindak selaku penasihat terkait penyusunan laporan ini.

Laporan ini dimaksudkan untuk keperluan informasi saja dan tidak dimaksudkan sebagai materi promosi dalam hal apa pun. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan saran atau rekomendasi dalam hal akuntansi, hukum, pajak atau investasi, dan tidak pula dimaksudkan sebagai penawaran atau permohonan untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun.

Meski segenap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan terjemahan, versi bahasa Inggris tetap merupakan versi final.

Pemberitahuan hak cipta

Semua data dan konten tertulis dilisensi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).



Pengguna bebas membagikan dan menyadur materinya, tetapi harus memberikan kredit yang sesuai, memberikan tautan ke lisensi, dan menunjukkan jika ada perubahan. Materi yang berlisensi tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial, atau digunakan secara diskriminatif, merendahkan, atau menimbulkan distorsi. Jika dikutip, atribusikan ke: «Responsible Mining Foundation (RMF) (2021), *'Saatnya menormalkan penghormatan dan pemulihan Hak Asasi Manusia di sektor pertambangan'*».

www.responsibleminingfoundation.org